

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

| No. | Masalah | Pokok Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|--|
| 1. | Persentase penegakan perda sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala | Fungsi koordinasi dalam penegakan pelanggaran Perda masih kurang optimal | Faktor Internal: Kompetensi SDM pada Satpol PP dalam melaksanakan operasi dalam Penegakan Perda dan Trantibum Faktor Eksternal: Kuranganya dukungan |

| No. | Masalah | Pokok Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|---|
| | | | Perangkat Daerah dalam rangka dalam informasi dan koordinasi pelanggaran Perda yang terjadi |
| 2. | Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat | Kurang sosialisasi dan informasi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban | Faktor Internal: Kurangnya koordinasi dan Sosialisasi dengan instansi terkait terhadap masyarakat. Faktor Eksternal: Terdapat kendala teknis pada Perangkat Daerah masing-masing sehingga Perangkat Daerah kurang berkoordinasi |
| 3. | Kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk tidak berjualan di tempat yang dilarang | Fungsi koordinasi dalam penegakan Perda masih kurang optimal | Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Satpol PP dalam melaksanakan fungsi koordinasi dalam Penegakan Perda Faktor Eksternal: Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dalam memberikan informasi pelanggaran Perda. Fungsi Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan |
| 4. | Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup pinggir pantai karena penambang pasir liar | Koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP Provinsi masih kurang. | Faktor Internal: Keterbatasan SDM Satpol PP Faktor Eksternal: Masih kurangnya koordinasi dalam peningkatan kerjasama dalam operasi penegakan Perda Provinsi. |

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bappelitbangda yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

Visi:
“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Bappelitbangda mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappelitbangda yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| Visi : “Sampang Hebat Bermartabat” | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| No | Misi dan Program Aksi | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | “Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik” . | 1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal 2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja “Persentase capaian indikator | 1 Kurangnya koordinasi dalam hal perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda 2 Keterbatasan SDM | 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan |

| Visi : "Sampang Hebat Bermartabat" | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|--|
| No | Misi dan Program Aksi | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah | kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ secara sempurna 3 Terdapat usulan kajian kelitbangan Perangkat Daerah yang masih belum terakomodir | pada Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya | tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP secara ideal 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan 4 Perkembangan teknologi dan informasi |

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang ada beberapa isu-isu strategis / tugas utama yang harus segera ditangani, yaitu :

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat.
- 2) Terbatasnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketemtraman masyarakat sehingga dalam pembagian tugas sebagian besar personil melaksanakan tugas rangkap.
- 3) Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas belum memadai
- 4) Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Formal
- 5) Penempatan kemampuan SDM yang tidak sesuai dengan tupoksiya
- 6) Akibat keterbukaan informasi global berdampak kepada cendrung menurunnya rasa nasionalisme
- 7) Penambahan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran).

Menghadapi kondisi dan situasi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang sesuai tugas dan fungsinya berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya, baik itu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja

organisasi dikendalikan bekerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dan Instansi Terkait antara lain TNI/POLRI/Kejaksaan dan SKPD terkait lainnya.

Dengan menggunakan analisis SWOT, sejumlah faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi kemudian dipetakan dalam suatu interaksi dengan menghubungkan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang serta kelemahan dengan ancaman. Dari interaksi faktor-faktor tersebut akan diperoleh sejumlah isu kebijakan strategis yang pada gilirannya akan dijadikan sebagai acuan dalam mengoptimalkan upaya organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang untuk mencapai kinerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (*Strength-Opportunity*)
 - a. Optimalisasi SDM yang memiliki pendidikan dan pengalaman kerja cukup serta memanfaatkan teknologi informasi global dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat
 - b. Mengoptimalkan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja serta ketersediaan dana, sarana dan prasarana dengan memanfaatkan dukungan masyarakat dan aparat keamanan dalam menciptakan Kabupaten Sampang kondusif dan terkendali.
2. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (*Strength-Threats*)
 - a. Mengoptimalkan SDM aparat guna melakukan operasi/sosialisasi dalam Penegakan PERDA.
 - b. Mengotimalkan SDM aparat, dana sarana dan prasarana dalam mengatasi fanatik pada pimpinan agama, ego sektoral, mudah emosional, kurang koordinasi pelaksanaan tugas.
 - c. Bekerjasama dengan instansi Terkait (TNI/POLRI/Kejaksaan dan SKPD terkait lainnya dalam melaksanakan TRANTIBUM.
3. Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (*Weaknesses-Opportunity*)
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, sarana dan dana yang diarahkan pada Kegiatan Penegakan Perda.

- b. Bekerjasama dengan instansi Terkait (TNI/POLRI/Kejaksaan dan SKPD terkait lainnya dalam melaksanakan TRANTIBUM.
4. Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman (*Weaknesses-Threats*)
 - a. Memfungsikan SDM aparat, sarana dan dana yang tersedia untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan masyarakat serta mengatasi ego sektoral, mudah emosional dan kasalahpahaman dalam melakukan Operasi/sosialisasi dalam penegakan PERDA.

Berdasarkan hasil penilaian dan pembobotan pilihan strategi, faktor – faktor penentu keberhasilan Satuan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar aparat terkait dalam penegakan Perda.
2. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat
4. Meningkatnya Kepatuhan Ketentuan/Pemenuhan syarat (ijin) yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Pengguna Jasa.
5. Meningkatnya pelayanan manajemen dalam mendukung pencapaian kinerja